



**NOTARIS**  
**NELSON EDDY TAMPUBOLON, SH**  
**SK. Menteri Kehakiman RI.**

Tanggal 18 Agustus 1998, No. : C-125.HT.03.02.Th. 1998

Jl. Pangeran Jayakarta No. 143 C  
Mangga Dua Selatan - Jakarta Pusat 10730  
Telp. : (021) 6264239, Fax. : (021) 6494008  
E-mail : notarisnelson@yahoo.com STTD-N No. : 728 PASAR MODAL

~~"GROSSE" SALINAN / KUTIPAN~~

AKTA ..... PENDIRIAN PERSEEROAN TERBATAS .....

"PT. N-THREE"  
.....  
.....  
.....  
.....

TANGGAL: 19 April 2004 ..... No. 19.- .....

**PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS**

**"PT. N-THREE"**

Nomor: 19.-

-Pada hari ini, Senin, tanggal sembilanbelas April duaribu empat (19-04-2004), -----  
-hadir dihadapan saya, **NELSON EDDY TAMPUBOLON**, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

1. Tuan **NABIL WAREETH**, lahir di Sana'a pada tanggal dua puluh enam -----  
September seribu sembilanratus enampuluh tiga (26-09-1963), Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Ampera Raya nomor 5 Kavling C, Kemang, Jakarta Selatan; -----

-pemegang Passport yang dikeluarkan oleh Negara United Kingdom of Great Britain And Northern Ireland tertanggal sebelas Jun duaribu tiga (11-06-2003) nomor: 740222521; -----

-warga negara Inggris; -----

2. Nona **NINA YULIANA**, lahir di Jakarta pada tanggal sembilanbelas Juli seribu sembilanratus tujuh puluh tiga (19-07-1973), Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kedondong 46 D, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Jaga Karsa, Kecamatan Jaga Karsa, Jakarta Selatan; -----

-pemegang Kartu Tanda Penduduk Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor: 09.5308.590773.0176; -----

-warga negara Indonesia; -----

- Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

- Para penghadap dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan satu perseroan terbatas dalam rangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 (seribu sembilanratus enampuluh tujuh), mengenai Penanaman Modal Asing, Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 (seribu sembilanratus tujuh puluh) dan didasarkan pada Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing yang dikeluarkan



oleh Kepada Badan Penanaman Modal dan Pendayagunaan Kekayaan dan Usaha Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tertanggal limabelas April dua — ribu empat) 15-04-2004) Nomor: 27/31//PMA/2004, dengan Anggaran Dasar ————— sebagaimana yang dimuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya cukup disingkat "Anggaran Dasar"), sebagai berikut: —————

————— - **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** - —————

————— - **Pasal 1.** - —————

1. Perseroan terbatas ini bernama: —————

————— - **"PT. N-THREE"** - —————

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta. —————

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi, dengan persetujuan dari seorang Komisaris. —————

————— - **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** - —————

————— - **Pasal 2.** - —————

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas lamanya, dengan tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 (seribu sembilanratus enampuluh tujuh) Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 (seribu sembilanratus tujuh puluh) tentang Penanaman Modal Asing yang berlaku bagi Perseroan ini untuk jangka waktu 30 (tigapuluh) tahun terhitung sejak Perseroan mulai beroperasi secara komersial, kecuali jika ijin Penanaman Modal Asing tersebut diperbaharui oleh pihak yang berwenang. —————

————— - **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** - —————

————— - **Pasal 3.** - —————

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah: —————  
berusaha dalam bidang Jasa. —————

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat —————  
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: —————

- Menjalankan usaha dibidang jasa konsultan manajemen. -----

- M O D A L -

- Pasal 4. -

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.859.000.000,- delapanratus limapuluh sembilan juta Rupiah (US\$.100.000.00 seratus ribu Dollar Amerika Serikat), terbagi atas 100.000 (seratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 8.590,- delapan ribu limaratus Rupiah (US\$.1.00 satu Dollar Amerika Serikat). -----
  2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan oleh para pendiri, yaitu: -----
    - a. Penghadap tuan **NABIL WAREETH** tersebut, sebanyak 95.000 (sembilanpuluh ribu) saham, dengan nilai nominal --- Rp.8.590,- delapanribu limaratus Sembilanpuluh Rupiah (US\$.1.00 satu Dollar Amerika Serikat) atau sebesar ----- Rp. 816.050.000,- delapanratus enambelas juta limapuluh ribu Rupiah (US\$.95.000.00 sembilan puluh lima ribu Dollar Amerika Serikat); -----
    - b. Penghadap nyonya **NINA YULIANA** tersebut, sebanyak 5.000 (limaribu) saham, --- dengan nilai nominal Rp.8.590,- delapanribu limaratus sembilanpuluh Rupiah --- (US\$.1.00 satu Dollar Amerika Serikat) atau sebesar ----- Rp. 42.950.000,- (empatpuluh dua juta sembilanratus limapuluh ribu Rupiah (US\$.5.000.00 lima ribu Dollar Amerika Serikat); -----
- sehingga seluruhnya berjumlah 100.000 -----  
(seratus ribu) saham atau sebesar ----- Rp. 859.000.000,-



delapanratus limapuluh sembilan juta juta ----

Rupiah (US\$.100,000.00 seratus ribu Dollar ----

Amerika Serikat); -----

3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp.859.000.000,- delapanratus ---- limapuluh sembilan juta Rupiah (US\$.100,000.00 seratus ribu Dollar Amerika Serikat), telah disetor penuh dengan uang tunai kepada Perseroan oleh masing-masing pendiri pada saat penanda-tanganan akta pendirian ini. -----

#### **- S A H A M -**

##### **- Pasal 5. -**

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama. -----
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham. -----
3. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut. -----
4. Selama ketentuan dalam ayat 3 di atas belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan. -----
5. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. --
6. Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang saham. -----

#### **- SURAT SAHAM -**

##### **- Pasal 6. -**

1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. -----

2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham. ....
3. Surat Kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. ....
4. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : .....
  - a. Nama dan alamat pemegang saham ; .....
  - b. Nomor surat saham ; .....
  - c. Tanggal pengeluaran surat saham ; .....
  - d. Nilai nominal saham. ....
5. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan : .....
  - a. Nama dan alamat pemegang saham ; .....
  - b. Nomor surat kolektif saham ; .....
  - c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham ; .....
  - d. Nilai nominal saham ; .....
  - e. Jumlah saham. ....
6. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditanda-tangani oleh Direktur Utama atau oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk untuk itu. ....

- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -

- **Pasal 7.** -

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. ....
3. Apabila surat saham hilang, maka atas permintaan mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. ....
4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, maka asli surat saham tidak

berlaku lagi terhadap Perseroan. -----

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan. -----
6. Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham. -----

#### ----- **DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS** -----

##### ----- **Pasal 8.** -----

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan. -----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat: -----
  - a. nama dan alamat para pemegang saham; -----
  - b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat saham yang dimiliki para pemegang saham; -----
  - c. jumlah yang disetor atas setiap saham; -----
  - d. nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut; -----
  - e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan -----
  - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi. -----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai pemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. -----
4. -Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. -----  
-Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam Daftar Pemegang Saham. -----
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. -----

6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan. \_\_\_\_\_

**- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -**

**- Pasal 9. -**

1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah. \_\_\_\_\_
2. Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 atau salinannya disampaikan kepada Perseroan. \_\_\_\_\_
3. Pemegang saham yang hendak memindahkan sahamnya harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. \_\_\_\_\_
4. Para pemegang saham lainnya berhak membeli saham yang ditawarkan dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal penawaran sesuai dengan perimbangan jumlah saham yang dimiliki masing-masing. \_\_\_\_\_
5. Perseroan wajib menjamin bahwa semua saham yang ditawarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak penawaran dilakukan. \_\_\_\_\_
6. Dalam hal Perseroan tidak dapat menjamin terlaksananya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 pemegang saham dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada karyawan mendahului penawaran kepada orang lain dengan harga dan persyaratan yang saham. \_\_\_\_\_
7. Pemegang saham yang menawarkan sahamnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 berhak menarik kembali penawaran tersebut setelah lewatnya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat 4. \_\_\_\_\_
8. Keharusan menawarkan saham kepada pemegang saham lain hanya dapat dilakukan satu kali. \_\_\_\_\_
9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan —



dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. \_\_\_\_\_

10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. \_\_\_\_\_

**- DIREKSI -**

**- Pasal 10 -**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari 1 (satu) orang Direktur dengan ketentuan berkewarganegaraan Asing. \_\_\_\_\_
2. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. \_\_\_\_\_
3. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris. \_\_\_\_\_
4. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka 30 (tigapuluh) hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2. \_\_\_\_\_
5. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris. \_\_\_\_\_
6. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. \_\_\_\_\_
7. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: \_\_\_\_\_
  - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6; \_\_\_\_\_
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; \_\_\_\_\_
  - c. meninggal dunia; \_\_\_\_\_
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. \_\_\_\_\_

- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -

- Pasal 11 -

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk -----  
kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya. -----
2. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: -----
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank); -----
  - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; -----  
harus dengan persetujuan seorang Komisaris. -----
4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang -----  
memiliki  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. -----
5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas harta kekayaan perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 -----

(tigapuluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut. \_\_\_\_\_

6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. \_\_\_\_\_  
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. \_\_\_\_\_
7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa. \_\_\_\_\_
8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris. \_\_\_\_\_
9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris. \_\_\_\_\_

- RAPAT DIREKSI -

- Pasal 12 -

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. \_\_\_\_\_
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar ini. \_\_\_\_\_
3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan Surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan \_\_\_\_\_

mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----

4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -  
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----  
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara --



sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. \_\_\_\_\_

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. \_\_\_\_\_

#### **- KOMISARIS -**

##### **- Pasal 13. -**

1. Komisaris terdiri dari 1 (satu) orang anggota Komisaris dengan ketentuan berkewarganegaraan Indonesia. \_\_\_\_\_
2. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu. \_\_\_\_\_
3. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. \_\_\_\_\_
4. Apabila oleh sesuatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini. \_\_\_\_\_
5. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. \_\_\_\_\_
6. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila: \_\_\_\_\_
  - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6; \_\_\_\_\_
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku; \_\_\_\_\_
  - c. meninggal dunia; \_\_\_\_\_
  - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. \_\_\_\_\_

## - TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS -

### - Pasal 14 -

1. Komisaris melakukan pengawasan atau kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. -----
2. Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. -----
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Komisaris. -----
4. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya. -----
6. Dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sesudah pemberitahuan sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri. -----
7. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, oleh salah seorang anggota Komisaris lainnya dan apabila tidak ada seorangpun anggota Komisaris yang hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. Ketidakhadiran tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain. -----
8. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka

waktu 30 (tigapuluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.

9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

#### **- RAPAT KOMISARIS -**

##### **- Pasal 15 -**

1. Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah.
2. Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama.
3. Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada setiap anggota Komisaris secara langsung, maupun dengan surat tercatat dengan mendapat tanda terima yang layak, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Komisaris akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Komisaris yang hadir. -----
7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah anggota Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah suara yang sah dikeluarkan dalam rapat. -----
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka Ketua Rapat --- Komisaris yang akan menentukan. -----
11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya. -----  
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----  
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
12. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul



yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris. —

**- TAHUN BUKU -**

**- Pasal 16 -**

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember. —

Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Perseroan ini dan ditutup pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu empat (31-12-2004). —

2. Dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah buku Perseroan ditutup, Direksi menyusun laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan. —

Laporan tahunan tersebut harus sudah disediakan di Kantor Perseroan paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham. —

**- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -**

**- Pasal 17 -**

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah: —

- a. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 Anggaran Dasar ini. —

- b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. —

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti — keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. —

**- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN -**

- Pasal 18. -

1. Rapat Umum Pemegang Saham tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup. \_\_\_\_\_
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan: \_\_\_\_\_
  - a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan — perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut untuk mendapat pengesahan rapat. \_\_\_\_\_
  - b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan utama Perseroan dan perubahannya selama tahun buku serta rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan rapat. \_\_\_\_\_
  - c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan. \_\_\_\_\_
  - d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar. \_\_\_\_\_
3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam perhitungan tahunan. \_\_\_\_\_
4. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka pemegang saham berhak memanggil sendiri Rapat Umum Pemegang Saham tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. \_\_\_\_\_

- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA -

- Pasal 19. -

1. Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang

Saham luar biasa. -----

2. -Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----  
-Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang hendak dibicarakan disertai alasannya. -----
3. Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah lewat waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak surat permintaan itu diterima, maka pemegang saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. -----
4. Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memberi izin tersebut. -----

#### ----- TEMPAT DAN PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

##### ----- Pasal 20 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usaha. -----
2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirim paling lambat 14 (empatbelas) hari sebelum tanggal rapat, dalam hal yang mendesak jangka waktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
3. -Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di Kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan. -----  
-Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan harus pula mencantumkan -

kan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 2 telah tersedia di Kantor Perseroan. -----

4. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 tidak menjadi syarat dan dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham dapat diselenggarakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia. -----

----- **PIMPINAN DAN BERITA ACARA** -----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 21.** -----

1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi, dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Komisaris, dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat. -----
2. -Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat. -----  
-Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat. -----
3. Penanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini tidak disyaratkan -----



apabila Berita Acara Rapat dibuat dalam bentuk akta Notaris. \_\_\_\_\_

**- KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN -** \_\_\_\_\_

**- Pasal 22, -** \_\_\_\_\_

- 1.a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini. \_\_\_\_\_
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua. \_\_\_\_\_
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat. \_\_\_\_\_
- d. Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak rapat pertama. \_\_\_\_\_
- e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. \_\_\_\_\_
- f. Dalam hal korum rapat tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan korum ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. \_\_\_\_\_
2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. \_\_\_\_\_
3. Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan. \_\_\_\_\_
4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk \_\_\_\_\_ mengeluarkan 1 (satu) suara. \_\_\_\_\_
5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa --- dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. \_\_\_\_\_

6. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam rapat. \_\_\_\_\_
7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. \_\_\_\_\_
8. -Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. \_\_\_\_\_  
-Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. \_\_\_\_\_
9. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. \_\_\_\_\_  
Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. \_\_\_\_\_

#### **- PENGGUNAAN LABA -**

##### **- Pasal 23 -**

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh rapat tersebut. \_\_\_\_\_
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tidak menentukan \_\_\_\_\_ penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan

oleh undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen. —

3. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup. —

4. -Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. —

-Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. —

-Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik Perseroan.

#### **PENGUNAAN DANA CADANGAN -**

##### **Pasal 24. -**

1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana cadangan ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. —
2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang-kurangnya 20 % (duapuluh persen) dari modal yang ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan. —
3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah sekurang-kurangnya 20 % (duapuluh persen) dari modal yang di tempatkan tersebut, maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan. —
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut — memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan

Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. \_\_\_\_\_

**- PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR -**

**- Pasal 25. -**

1. -Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. \_\_\_\_\_  
-Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta Notaris dan dalam bahasa Indonesia. \_\_\_\_\_
2. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut pengubahan nama, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor dan pengubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. \_\_\_\_\_
3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini cukup dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambatnya 14 (empatbelas) hari terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tentang pengubahan tersebut serta didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan. \_\_\_\_\_
4. Apabila dalam rapat yang dimaksud dalam ayat 1 korum yang ditentukan tidak tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama itu, dapat diselenggarakan rapat kedua dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenai jangka waktu panggilan harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua tersebut, tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat dan keputusan disetujui paling sedikit lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari \_\_\_\_\_



jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -----

5. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang terbit dan atau beredar secara luas di tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut. -----

#### **- PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN -**

##### **- Pasal 26 -**

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penggabungan, peleburan dan pengambilalihan, hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per-empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. -----
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian mengenai rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. -----

#### **- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -**

##### **- Pasal 27 -**

1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per-empat) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. -----
2. Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus ----- diadakan likuidasi oleh likuidator. -----

3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak menunjuk likuidator. -----
4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan. -----
5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan serta memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak Perseroan dibubarkan. -----
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta pendirian bersama ---- pengubahannya dikemudian hari tetap berlaku sampai dengan tanggal ---- disahkannya perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likuidator. ---

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 28.** -----

-Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan. -----

-Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, menerangkan bahwa: -----

1. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 10 dan pasal 13 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, telah diangkat sebagai: -----

- **Direktur** -----: penghadap tuan **NABIL WAREETH** tersebut -----

- **Komisaris** -----: penghadap nona **NINA YULIANA** tersebut; -----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama kali diadakan setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----

Indonesia

II. Direksi perseroan dan/atau

Pegawai Kantor Notaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menanda-tangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

- DEMIKIANLAH AKTA INI -

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh tuan **TURASNO** dan tuan **ENUH RUSTAMA**, keduanya Pegawai Kantor Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.

-Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka segera para penghadap, para saksi, dan saya, Notaris, menanda-tangani akta ini.

-Dilaksanakan dengan tanpa coretan, coretan dengan gantiannya maupun tambahan.

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan secukupnya.

-Diberikan sebagai Salinan yang sama bunyinya.

Notaris di Jakarta,



*[Handwritten signature]*



